

**PENGARUH FDR, BOPO DAN NPF TERHADAP CAR
(Studi Kasus BNI Syariah Periode 2011-2018)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

NUZULUL MUHAMMAD NUR

NIM. 1505036093

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2019**

Drs. H. Wahab. MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Kelurahan Bangetayu Wetan RT 02 RW 01 Kec. Genuk Kota Semarang, Kode Pos 50115.

Nurudin, SE., MM.

NIP. 19900523 201503 1 004

Desa Sukodono RT 01 RW 04 Kec. Bonang Kab. Demak, Kode Pos 59552.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Nuzulul Muhammad Nur

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nuzulul Muhammad Nur

NIM : 1505036093

Judul : **Pengaruh FDR BOPO dan NPF Terhadap CAR**
(Studi Kasus BNI Syariah Periode 2011-2018)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juli 2019

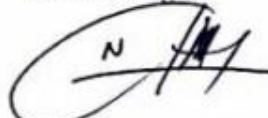
Pembimbing I



Drs. H. Wahab. MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II



Nurudin, SE., MM.

NIP. 19900523 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185 Telephone. (024) 7608454

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Nuzulul Muhammad Nur
NIM : 1505036093
Judul : **Pengaruh FDR BOPO dan NPF Terhadap CAR**
(Studi Kasus BNI Syariah Periode 2011-2018)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal
18 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana
(Strata Satu/S1) dalam ilmu Perbankan Syariah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 18 Juli 2019

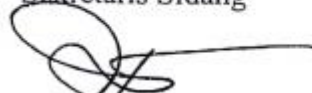
Dewan Penguji

Ketua Sidang


H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

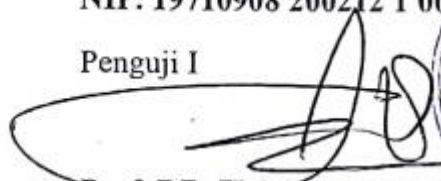
NIP. 19710908 200212 1 001

Sekretaris Sidang


Drs. H. Wahab, MM.

NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji I


Prof. DR. H. Mujiyono, M.A.

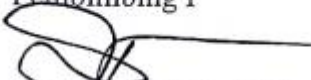
NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji II

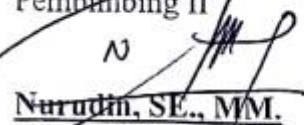

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.

NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing I


Drs. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II


Nurudin, SE., MM.
NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Manusia kuasa atas diriya”

(Prof. DR. H. Mujiyono Abdillah, M.A.)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rida Allah swt, penulis mempersembahkan karya skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Bapak Sa'dullah dan Ibunda tersayang Ibu Wakiah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2019

Deklarator



Nuzulul Muhammad Nur
NIM. 1505036093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ- = a

ِ- = i

ُ- = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina* 'ah.
Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. *Ta' Marbutah* (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas yang diukur dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*), risiko operasional yang diukur oleh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan risiko kredit yang diukur dengan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap modal yang diukur oleh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di PT. Bank BNI Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Data sekunder diambil dari laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan di situs resmi BNI Syariah (www.bnisyariah.com) dari triwulan pertama 2011 hingga triwulan keempat 2018. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Analisis regresi linier berganda, uji T, uji F dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR. Hal ini karena nilai t FDR menunjukkan arah negatif yakni -0,415 dengan nilai signifikan sebesar 0,681 dimana nilai ini lebih dari 0,05. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Hal ini karena nilai t BOPO menunjukkan arah negatif yakni -3,861 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. dimana nilai ini kurang dari 0,05. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. Hal ini karena nilai t NPF menunjukkan arah positif yakni 2,385 dengan nilai signifikan sebesar 0,024. dimana nilai ini kurang dari 0,05.

Kata Kunci: Risiko, Permodalan, BNI Syariah, FDR, BOPO, NPF, CAR.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of liquidity risk as measured by FDR (Financing to Deposit Ratio), operational risk measured by BOPO (*Operational Expenses to Operational Revenue*) and credit risk as measured by NPF (Non Performing Financing) on capital as measured by CAR (Capital Adequacy Ratio) at PT. Bank BNI Syariah.

The type of research used is explanatory research and library research with a quantitative approach. Samples were taken by purposive sampling technique. Secondary data is taken from quarterly financial reports published on the official website of BNI Syariah (www.bnisyariah.com) from the first quarter of 2011 to the fourth quarter of 2018. Data is collected by documentation method and analyzed using descriptive analysis, classic assumption test which includes normality test, test multicollinearity and autocorrelation test. Multiple linear regression analysis, T test, F test and coefficient of determination.

The results showed that FDR had no significant negative effect on CAR. This is because the value of FDR t shows a negative direction which is -0.415 with a significant value of 0.681 where this value is more than 0.05. BOPO has a significant negative effect on CAR. This is because the value of t BOPO shows a negative direction of -3,861 with a significant value of 0,001. where this value is less than 0.05. NPF has a significant positive effect on CAR. This is because the value of t NPF shows a positive direction of 2,385 with a significant value of 0.024. where this value is less than 0.05.

Keywords: Risk, Capital, BNI Syariah, FDR, BOPO, NPF, CAR.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis menyampaikan rasa syukur yang sangat mendalam kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh FDR, BOPO dan NPF Terhadap CAR (Studi Kasus BNI Syariah Periode 2011-2018”** .

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan agar penulis mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu perbankan syariah. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis agar dapat memadukan pengetahuan dan ketrampilan dalam memahami, menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan masalah yang berhubungan. Selain itu, Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar strata S.1 dalam ilmu perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari berbagai pihak dari awal hingga akhir. Atas bantuan dan dukungan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh jajaran kepengurusannya.
2. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah dan seluruh jajaran kepengurusannya.
3. Bapak Dr. Muhlis, M.Si atas bimbingannya selama proses kuliah.
4. Bapak Drs. H. Wahab, MM. dan bapak Nurudin, SE., MM. atas kesedianya memberikan waktu luang kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Pejabat dan Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan dorongan serta doa yang selalu mengiringi penulis.

7. Teman-teman yang tidak, akan, sedang dan sudah menyusun skripsi, sehingga dapat bersama-sama membuat pengalaman baru.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juli 2018

Penulis



Nuzulul Muhammad Nur

NIM. 1505036093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perbankan Syariah.....	8
2.2 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	18
2.3 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	25
2.4 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	28
2.5 <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	30
2.6 Penelitian Terdahulu	34
2.7 Kerangka Pemikiran.....	38
2.8 Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Sumber Data.....	41
3.3 Populasi dan Sampel	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	45
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas.....	45
3.6.2.3 Uji Autokorelasi	46
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	46
3.6.4 Uji T	47
3.6.5 Uji F	47
3.6.6 Koefisien Determinasi.....	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.1 Profil BNI Syariah	49
4.1.2 Produk dan Layanan BNI Syariah	53

4.2 Analisis Data	64
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	64
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	64
4.2.2.1 Uji Normalitas	65
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	66
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	67
4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda	68
4.2.4 Uji T	70
4.2.5 Uji F	71
4.2.6 Koefisien Determinasi	72
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Pengaruh FDR Terhadap CAR	73
4.3.2 Pengaruh BOPO Terhadap CAR	73
4.3.3 Pengaruh NPF Terhadap CAR	74
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	75
5.3 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah.....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 4.1 Profil BNI Syariah	49
Tabel 4.2 Jejak Langkah BNI Syariah	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	66
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Tolerance</i> dan VIF.....	67
Tabel 4.6 Hasil <i>Runs Test</i>	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Kecukupan Modal	3
Gambar 2.1 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Logo BNI Syariah	48
Gambar 4.2 Hasil Uji <i>Normal P-P Plot of Regression</i> <i>Standardized Residual</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	81
Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	82
Lampiran 3 Hasil Uji <i>Normal P-P Plot of Regression</i> <i>Standardized Residual</i>	83
Lampiran 4 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	83
Lampiran 5 Hasil Uji <i>Tolerance</i> dan <i>VIF</i>	84
Lampiran 6 Hasil <i>Run Test</i>	84
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	84
Lampiran 8 Hasil Uji T	85
Lampiran 9 Hasil Uji F	85
Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Karim,¹ Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia terkhusus pelaku ekonomi dan bisnis adalah *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggungjawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Dalam hidup setiap muslim *siddiq* harus menjadi visi, *amanah* menjadi misi, *fathanah* sebagai strategi dan *tabligh* sebagai sebuah taktik. Dengan sifat-sifat tersebut, manusia dapat berperilaku, berakhlak secara profesional (*ihsan, itqan*) dalam bidang ekonomi.

Menurut Kuran T dalam Prasetyoningrum,² meskipun ekonomi Islam membahas berbagai aspek ekonomi, perbankan syariah saat ini dianggap sebagai karakteristik penentu sistem ekonomi Islam. Belakangan ini kemajuan dan perkembangan bank syariah secara kuantitatif sangat mengembirakan. Perkembangan ini tentunya akan semakin bertambah untuk masa-masa yang akan datang. Perkembangan yang bersifat kuantitatif ini harus diimbangi dengan perkembangan kualitas. Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan, kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam buku karangan Julius R Latumaerissa menyebutkan definisi umum mengenai permodalan diperkenalkan dalam dokumen Accord 88 (Juli 1988), *Amendment to Incorporate Market Risk* (1996) dan Basel II (Juni 2004). Komponen modal terdiri dari 3 tingkatan (*tier*) yaitu *Tier 1*, *Tier 2* dan *Tier 3*.

Modal *Tier 1* (modal inti) terdiri dari instrumen yang memiliki kapasitas terbesar untuk menyerap kerugian setiap saat. Modal *Tier 2* (modal

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. h. 38.

² Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. h. 4.

pelengkap) terdiri dari campuran instrumen ekuitas secara umum dan modal *hybrid*/instrumen utang. Modal *Tier 3* (modal pelengkap tambahan) ditambahkan pada tahun 1996 dan hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan modal pada risiko pasar.³

Negara-negara yang sistem perbankan nasionalnya terkait dengan pasar uang internasional, termasuk Indonesia mulai menerapkan ketentuan kebutuhan modal minimal yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*). Penerapan di Indonesia dilakukan secara bertahap dari 5% pada akhir Maret 1992, 7% pada akhir Maret 1993 dan 8% pada akhir Desember 1993.⁴

Secara konsepsional, modal bank tidak hanya berperan sebagai dana yang siap dioperasikan tetapi juga merupakan faktor kritis dalam mempertimbangkan hubungan antara risiko-hasil (*return-risk trade off*). Faktor kritis ini dijelaskan jika terlalu banyak modal suatu bank maka akan mengakibatkan hasil yang kecil bagi pemiliknya. Sebaliknya, jika bank terlalu kecil modalnya maka akan memungkinkan ketidakpercayaan oleh para calon atau penyimpan uang karena takut uang miliknya tidak dapat ditarik kalau bank yang dimaksud mengalami risiko kerugian usaha.⁵

Terdapat keterkaitan penting antara kecukupan modal dengan risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar modal yang dibutuhkan oleh perbankan syariah.⁶ Berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang harus dikelola oleh bank. Yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

³ Julius R Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014. h. 49.

⁴ *Ibid*, h.50.

⁵ *Ibid*, h.50.

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013. h. 32.

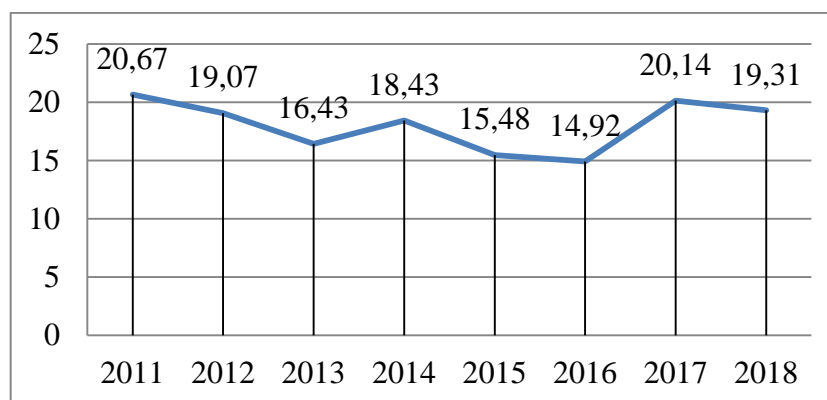
Penelitian ini melibatkan tiga dari sepuluh jenis risiko, yakni risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional, masing-masing risiko tersebut diproksikan dengan suatu rasio. Risiko likuiditas diproksikan oleh FDR (*Financing to Deposit Ratio*), risiko operasional diproksikan oleh BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dan risiko kredit diproksikan oleh NPF (*Non Performing Financing*). Sedangkan permodalan bank di proksikan oleh CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Berdasarkan akses data yang diperoleh peneliti dari pemberitaan *kontan.co.id* menyebutkan permodalan BNI Syariah terus menguat yang dicerminkan oleh rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Peningkatan ini dari posisi 2016 sebesar 14,92% menjadi 20,14% di tahun 2018. Menurut Dhas Widhiyati, Direktur Bisnis BNI Syariah menjelaskan bahwa peningkatan ini adalah berkat dukungan modal sebesar Rp 1 triliun dari BNI sebagai komitmen untuk mengembangkan bisnis syariah.⁷

Namun jika dilihat berdasarkan histori laporan keuangan 2011 sampai dengan 2018 di *website* resmi *www.bnisyariah.co.id*. BNI Syariah mengalami kenaikan hanya pada 2014 dan 2017. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Rasio Kecukupan Modal



Sumber: Data sekunder diolah, 2019

⁷ Yoliawan H, "Modal BNI Syariah terus menguat di akhir tahun 2017". <http://keuangan.kontan.co.id/news/modal-bni-syariah-terus-menguat-di-akhir-tahun-2017>. Diakses 17 Maret 2019.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan BNI Syariah sebagai objek penelitian ini. Penelitian tentang CAR, dapat dijumpai dari beberapa penelitian terdahulu, namun dalam penelitian ini akan menguji pengaruhnya FDR, BOPO dan NPF terhadap CAR.

Pada penelitian Moch Rizal Maolany, Nurhayati dan Heliiana (2015), Diah Rochmayanti Suhadi (2015), Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu (2016), Adi Isa Ansori dan Herizon (2017), menghasilkan FDR berpengaruh positif terhadap CAR, sedangkan FDR berpengaruh negatif terhadap CAR diperoleh dari hasil penelitian Siti Fatimah (2013), Intannes Putri Basse (2016), Giras Risti Wilara dan Agus Tri Basuki (2016). Adapula yang menghasilkan penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh antara FDR dan CAR seperti pada hasil penelitian Rizky Natasia (2015).

Pada penelitian Siti Fatimah (2013) dan Diah Rochmayanti Suhadi (2015) menghasilkan BOPO berpengaruh positif terhadap CAR, sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap CAR diperoleh dari hasil penelitian Rizky Natasia (2015), Adi Isa Ansori dan Herizon (2017), Ayusta Riana Dewi dan I Putu Yadnya (2018). Adapula yang menghasilkan penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh antara BOPO dan CAR seperti pada hasil penelitian Hendra Fitrianto dan Wisnu Mawardi (2006).

Pada penelitian Gladis Kusuma Jaya (2017) menghasilkan NPF berpengaruh positif terhadap CAR. NPF berpengaruh negatif terhadap CAR diperoleh dari hasil penelitian Diah Rochmayanti Suhadi (2015) dan Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu (2016), Intannes Putri Basse (2016), Adi Isa Ansori dan Herizon (2017). Adapula yang menghasilkan penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh antara NPF dan CAR seperti pada hasil penelitian Hendra Fitrianto dan Wisnu Mawardi (2006), Rizky Natasia (2015), Giras Risti Wilara dan Agus Tri Basuki (2016).

Berdasarkan uraian diatas sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan judul **“Pengaruh FDR, BOPO dan NPF Terhadap CAR (Studi Kasus BNI Syariah Periode 2011-2018)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah FDR berpengaruh terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018?
- 2) Apakah BOPO berpengaruh terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018?
- 3) Apakah NPF berpengaruh terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini secara khusus bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) yakni, manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penelitian sejenis.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu perbankan syariah dan menambah literatur dalam bidang perbankan syariah, khususnya mengenai risiko usaha dan kecukupan modal bank umum syariah.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kecukupan modal pada perbankan syariah.

3) Manfaat Bagi Penelitian Sejenis

Penelitian yang dikembangkan dari beberapa variabel ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kalangan akademis dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi baik teori maupun hasil temuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang berisi

BAB I : Dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi terutama pada rasio kecukupan modal dan risiko usaha bank umum syariah. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan secara teoritis mengenai perbankan syariah dan variabel penelitian dari berbagai literatur. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Dalam bab ini diuraikan tentang metodologi penelitian yang berisi penguraian tentang jenis, sumber, populasi, sampel penelitian dan teknik pengumpulan data pada setiap variabel serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : Dalam bab ini diberikan penjelasan tentang hasil analisis dan pengujian data penelitian.

BAB V : Dalam bab ini berisikan penutup yang menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dipisahkan dari sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah dapat juga diartikan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Selain itu, perbankan syariah harus memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *riswah* dan objek haram lainnya.⁹

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi diartikan sebagai kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian diartikan sebagai pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba

Menurut Quraish Shihab dalam Abdul Ghofur, kata *riba* dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang *riba* pada masa Nabi dapat dibenarkan seperti dalam kandungan surat Al-Baqarah

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013. h. 3.

ayat 275. Ketika itu mereka berkata “jual beli sama saja dengan riba”. Namun Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan. Sedangkan secara istilah dalam madzhab Syafi’i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.¹⁰

Riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi’ah*). Hal ini didasari oleh surat Al-Baqarah ayat 278-280.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".¹¹

¹⁰ Abdul Ghofur, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Semarang: Economica, Volume VII, 2016. h. 4-5.

¹¹ <https://litequran.net/al-baqarah>. Diakses 18 Juli 2019.

2. Maisir

Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Hal ini didasari oleh surat Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*¹²

3. Gharar

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim, hadits no. 2783).*¹³

4. Haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa

¹² <https://litequran.net/al-maidah>. Diakses 2 Maret 2019.

¹³ Rikza Maulan, “Rehad (Renungan Hadits) 120 Larangan Jual Beli Gharar”. <http://rikzamaulan.blogspot.com/2016/08/rehad-120-larangan-jual-beli-gharar.html>. Diakses 2 Maret 2019.

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁴

5. Zalim

Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Hal ini dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk bank syariah meliputi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional.

Bank umum syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh,

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
3. Pemerintah daerah.

¹⁴ <https://litequran.net/al-baqarah>. Diakses 2 Maret 2019.

¹⁵ <https://litequran.net/an-nisa>. Diakses 2 Maret 2019.

Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank umum syariah dapat pula,

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

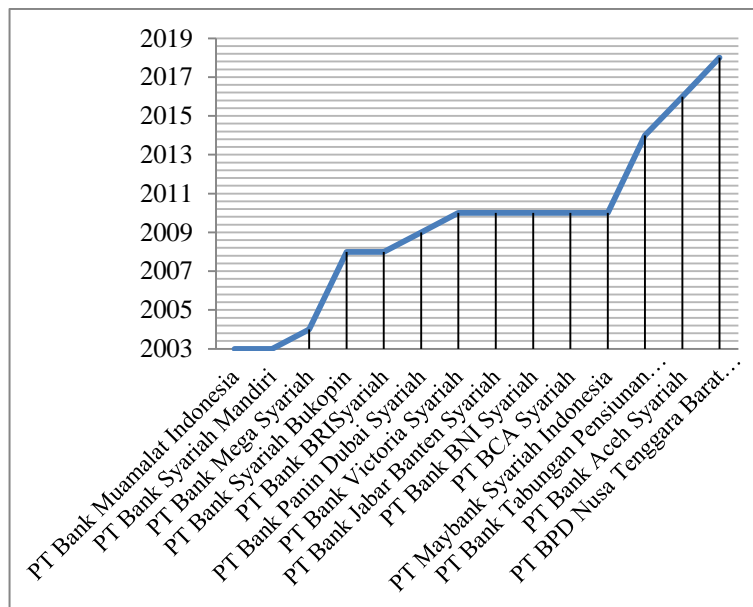
Unit usaha syariah (UUS) dapat menjadi bank umum syariah (BUS) setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah dengan bank lainnya, bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah.

Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Keduanya dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, kedua lembaga tersebut dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.

Pengawasan kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah adalah salah satu tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi.

Di Indonesia peningkatan jumlah industri perbankan syariah bertambah dari tahun ke tahun. Misalnya pada bank umum syariah telah berkembang menjadi 14 bank seperti yang ada pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Perkembangan ini harus diimbangi dengan pengantisipasi risiko yang kemungkinan terjadi, karena pada dasarnya lembaga keuangan seperti bank umum syariah tidak hanya akan menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi bisa juga akan mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.¹⁶ Oleh karena itu, semakin kompleksnya aktivitas bank, maka risiko yang akan dihadapi semakin meningkat.

Bank syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, perlindungan nasabah dan manajemen risiko. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

¹⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013. h. 30.

Perlindungan nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah. Sedangkan dalam manajemen risiko berisi serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Berbagai jenis risiko dalam perbankan syariah dapat dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah

Jenis Risiko	Uraian
Risiko Kredit	Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
Risiko Pasar	Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
Risiko Likuiditas	Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
Risiko Operasional	Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko Hukum	Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
Risiko Reputasi	Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
Risiko Strategik	Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Risiko Kepatuhan	Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
Risiko Imbal Hasil	Risiko imbal hasil (<i>rate of return risk</i>) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
Risiko Investasi	Risiko investasi (<i>equity investment risk</i>) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit <i>and loss sharing</i> .

Sumber: PBI Nomor 13/23/Pbi/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan

prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan UUS.

Ketika bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

1. Membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham.
2. Meminta pemegang saham menambah modal.
3. Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi bank syariah.
4. Meminta bank syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya.
5. Meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain.
6. Meminta bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya.
7. Meminta bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain.
8. Meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank syariah kepada pihak lain.

Apabila tindakan diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, maka Bank Indonesia menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Namun jika Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bank syariah tidak diselamatkan, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank syariah.

2.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR atau *capital adequacy ratio* merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada beberapa tahun

belakangan menunjukkan bahwa kegagalan bank antara lain disebabkan oleh tidak memadainya kualitas dan kuantitas permodalan bank untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Penyediaan dalam memperoleh modal diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*¹⁷

Sehingga dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas modal bank agar bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan, maka persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu kerangka permodalan yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Perhitungan kecukupan modal ini merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Pada standar internasional, bank disyaratkan untuk mengembangkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktik manajemen risiko di bank. Selanjutnya otoritas jasa keuangan melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) terhadap kecukupan ICAAP yang dilakukan bank untuk memastikan tingkat permodalan bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya.

¹⁷ <https://litequran.net/an-nisa>. Diakses 18 Juli 2019.

Menurut Kasmir,¹⁸ modal terdiri dari dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas, sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Rincian masing-masing komponen dari modal bank adalah sebagai berikut:

a. Modal Inti, terdiri dari:

- 1) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- 2) Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- 6) Laba Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS (50%).
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan (50%).
- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

b. Modal Pelengkap, terdiri dari:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Gra-findo Persada, 2012. h. 298.

- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang di klasifikasikan (1,25% ATMR)
- 3) Modal pinjaman.
- 4) Pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari modal inti).

Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena pinjaman menurut bank syariah harus tunduk pada prinsip *qard* dan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat.¹⁹

Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *capital adequacy ratio* (CAR). Penyediaan modal minimum yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1.
2. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.
3. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3.
4. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

ATMR adalah kumpulan aset dalam neraca yang telah dikalikan dengan bobot risiko.²⁰ ATMR terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang pada setiap pos aktiva, beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.²¹

Aktiva dalam perhitungan ini adalah mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002. h. 215-216.

²⁰ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. h.19.

²¹ Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamii atau sifat barang jaminan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka rincian bobot risiko dan ATMR untuk semua aktiva adalah sebagai berikut:

a. Aktiva Neraca:

- 1) Kas (0%).
- 2) Emas dan mata uang emas (0%).
- 3) Giro pada Bank Indonesia.
- 4) Tagihan pada bank lain (20%).
- 5) Surat berharga yang dimiliki (0%).
- 6) Pembiayaan yang diberikan.
- 7) Penyertaan (100%).
- 8) Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) (100%).
- 9) Antar kantor aktiva (*netto*) (100%).
- 10) Rupa – rupa aktiva (100%).

b. Rekening Administratif :

- 1) Fasilitas pembiayaan yang belum dipergunakan yang disediakan sampai dengan tahun takwim berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan, atau dijamin surat berharga (0%).
- 2) Jaminan bank (0%).
- 3) Kewajiban membeli kembali aktiva bank dengan syarat *repurchase agreement* (100%).
- 4) Posisi netto kontrak berjangka valuta asing dan *swapbunga* (4%).

Dalam menghitung ATMR terhadap masing-masing pos aktiva, Bank Indonesia memberikan pedoman berupa bobot risiko yang besarnya didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, serta sifat agunan. Sementara itu, untuk pembiayaan yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan pembiayaan pada tahap yang bersangkutan. Cara menghitung lebih lanjut adalah dengan mengalikan

nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko yang diberikan oleh Bank Indonesia. Demikian juga untuk rekening *administrative*, ATMR-nya dihitung dengan cara yang sama, yakni dengan mengalikan bobot dengan nilai nominalnya.²²

Selain menyediakan KPMM sesuai profil risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan. Tambahan modal tersebut dapat berupa:

1. *Capital Conservation Buffer*, yaitu tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis. *Capital Conservation Buffer* ini ditetapkan sebesar 2,5% dari ATMR.
2. *Countercyclical Buffer*, yaitu tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. *Countercyclical Buffer* ini ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR.
3. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)*, yaitu tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian. *Capital Surcharge D-SIB* ini ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR.

Pemenuhan kebutuhan rasio modal minimal bank atau dikenal CAR juga diterbitkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*) sebesar 8%. Ketentuan yang dibuat oleh BIS ini tidak bersifat mengikat, namun hampir seluruh bank sentral di dunia mengadopsi ketentuan BIS.²³ Indonesia menjadi salah satu yang mengadopsi ketentuan tersebut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

²² Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003. h. 144.

²³ Selamat Riyadi, "CAR (Capital Adequacy Ratio)", <https://dosen.perbanas.id/car-capital-adequacy-ratio/>. Diakses 10 Maret 2019.

Minimum Bank Umum Syariah. Dalam POJK tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Namun dalam hal tertentu, otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum jika bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Menurut Hasibuan,²⁴ CAR yang didasarkan pada standar BIS yang besarnya 8% bertujuan untuk:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank bersangkutan.
3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS perbankan internasional dengan formula:
 - a. 4% modal inti yang terdiri dari *stakeholder equity*, *preferred stock*, dan *freereserves*.
 - b. 4% modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provision*, *hybrid securities*, dan *revolution reserves*.

Dalam dunia perbankan, modal merupakan salah satu bagian terpenting untuk mengetahui kondisi kesehatan bank.²⁵ Selain itu permodalan dalam perbankan juga diyakini sebagai salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan masyarakat.²⁶ Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan modal bank untuk menyangga risiko yang terjadi saat ini dan risiko dimasa yang akan datang.²⁷

Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Oleh karena itu, CAR dapat menentukan keberlangsungan sebuah bisnis perbankan.²⁸ CAR

²⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. h. 58-59.

²⁵ Giras Risti Wilara, et al. *Determinan Ketahanan Modal Bank Syariah di Indonesia: Pendekatan ECM*, Malang: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Volume 17, 2016. h. 158.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

²⁷ Feby Loviana Nazaf, *Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Kecukupan Modal Perbankan*, 2014. h. 2.

²⁸ Yanuar Rizky Nuh, *Pengaruh Variabel Makro dan Rasio Keuangan Empiris*, 2016. h. 3.

dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$CAR = \frac{\text{MODAL}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.3 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR atau *financing to deposit ratio* merupakan salah satu rasio yang mengukur risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Menurut Zainul Arifin,²⁹ likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Maka pengelolaan likuiditas yang baik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya karena mereka yakin bahwa bank tersebut mampu menjamin dananya apabila sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo dapat menarik kembali dananya. Selain itu dalam memitigasi risiko atas likuiditas diterangkan dalam surat Luqman ayat 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal."*³⁰

Bank harus mempunyai cukup dana atau sumber dana likuid untuk membayar giro, deposito dan tabungan yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005.

³⁰ <https://litequran.net/luqman>. Diakses 18 Juli 2019.

tabungan milik para nasabah, bank tersebut akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat.³¹

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank adalah karena ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar.³²

Menurut Taswan,³³ tingkat likuiditas bank dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Untuk menunjukan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
2. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen pembiayaannya.
3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
4. Untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
5. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya.

Taswan mengungkapkan tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Karena menurutnya FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Sehingga dalam perhitungan FDR sedapat mungkin tidak ada perbedaan di antara perbankan.³⁴

Pada umumnya konsep yang ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *financing to deposit ratio*

³¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. h. 31.

³³ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006. h. 6.

³⁴ *Ibid.*, h. 114.

(FDR). FDR yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan.³⁵ Selain itu, FDR merupakan rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.³⁶

Menurut Dendawijaya,³⁷ *financing to deposit ratio* (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi jangka pendek. FDR dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan. FDR dapat diperoleh seperti rumus di bawah:

$$FDR = \frac{\text{JUMLAH PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN}}{\text{TOTAL DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%$$

Menurut Rivai,³⁸ FDR dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga. Berdasarkan Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, besarnya FDR dinilai dengan kriteria menurut peringkat,³⁹ dimana

1. Peringkat 1 (satu) merupakan penilaian dengan kriteria terbaik yaitu dengan nilai FDR dibawah 50 hingga 75%.
2. Peringkat 2 (dua) ketika FDR berada diantara diatas 75 hingga 85%
3. Peringkat 3 (tiga) jika FDR berkisar antara diatas 85 hingga 100%.

³⁵ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. h. 265.

³⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. h. 148.

³⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

³⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. h. 784-785

³⁹ Surat Edaran No. 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Lampiran 1a.

4. Peringkat 4 (empat) jika FDR berada diantara diatas 100 hingga 120%.
5. Peringkat 5 (lima) merupakan peringkat terburuk bila FDR berada diatas 120%.

Ketersediaan likuiditas harus cukup, tidak boleh terlalu kecil dan terlalu besar, hal ini agar aktivitas bank tidak terganggu. Jika nilai FDR terlalu tinggi maka perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai FDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui pembiayaan yang disalurkan.

Terdapat hubungan antara CAR dan FDR. Menurut Edy Setiadi,⁴⁰ jika CAR rendah ideal untuk FDR maksimal 99%. Tetapi jika CAR lebih dari 20% maka tidak masalah FDR diatas 100%. Sedangkan idealnya CAR adalah 14%.

2.4 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional merupakan salah satu rasio yang mengukur risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan *system*, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 juga menerangkan untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*⁴¹

⁴⁰ Agustiyanti, "April, OJK Keluarkan Peraturan Kesehatan Bank Syariah". <http://beritasatu.com/ekonomi/169924/april-ojk-keluarkan-peraturan-kesehatan-bank-syariah>. Diakses 12 Mei 2019.

⁴¹ <https://litequran.net/al-hasyr>. Diakses 18 Juli 2019.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial.

Rasio ini menggambarkan efisiensi bank dalam melakukan kegiatannya. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien bank dalam beroperasi. BOPO dapat diperoleh seperti rumus di bawah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{BIAYA OPERASIONAL}}{\text{PENDAPATAN OPERASIONAL}} \times 100\%$$

Biaya operasional terdapat dalam laporan perhitungan laba-rugi bank umum syariah. Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya dalam rupiah dan valuta asing yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Biaya operasional terdiri dari beban bonus titipan *wadiah*, beban transaksi valuta asing, biaya perbaikan aktiva *ijarah*, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sewa, promosi, pajak-pajak (di luar pajak penghasilan), pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris, penyusutan, penurunan nilai surat berharga, lainnya.⁴²

Pendapatan operasional juga terdapat dalam laporan perhitungan laba-rugi bank umum syariah. Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan dalam rupiah dan valuta asing, baik dari penduduk, maupun bukan penduduk yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank syariah. Pendapatan operasional disajikan setelah dikurangi dengan bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya.⁴³

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

⁴² Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. h. 658-660.

⁴³ *Ibid.* h. 654-656.

Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya dijelaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS menyebutkan jika efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO.

Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. BOPO yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 83% yang berarti kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. jika rasio BOPO melebihi 89% maka bank tersebut dapat dikategorikan kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.⁴⁴ BOPO dinilai dengan kriteria menurut peringkat,⁴⁵ dimana

1. Peringkat 1 (satu) merupakan penilaian dengan kriteria terbaik yaitu dengan nilai BOPO dibawah atau sama dengan 83%.
2. Peringkat 2 (dua) ketika BOPO berada diantara diatas 83 hingga 85%.
3. Peringkat 3 (tiga) jika BOPO berkisar antara diatas 85 hingga 87%.
4. Peringkat 4 (empat) jika BOPO berada diantara diatas 87 hingga 89%.
5. Peringkat 5 (lima) merupakan peringkat terburuk bila BOPO berada diatas 89%.

2.5 Non Performing Financing (NPF)

NPF atau *non performing financing* adalah salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah

⁴⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁵ Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Lampiran 1c.

risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Dalam proses pelunasan pembiayaan juga dibahas pada surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*⁴⁶

Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Bank melakukan penggolongan kualitas pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan *performing* dan *non performing*. Pembiayaan *performing* disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah, dibedakan menjadi dua kategori yaitu,⁴⁷

1. Pembiayaan Lancar (*pass*)

Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:⁴⁸

- Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
- Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angsuran tunai (*cash collateral*).

⁴⁶ <https://litequran.net/al-baqarah>. Diakses 18 Juli 2019.

⁴⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta:Kencana, 2010. h. 122.

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2008. h. 33-38.

2. Perhatian Khusus (*Special mention*)

Pembiayaan dalam perhatian khusus merupakan pembiayaan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

Non performing financing merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan yang bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan, dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.
- e. Terdapat indikasi masalah yang dihadapi debitur; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

2. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang dianggap pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bagi hasil.

- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

3. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Rasio ini menggambarkan pada penyaluran pembiayaan bank. Semakin tinggi nilai NPF artinya semakin berpengaruh buruk terhadap pembiayaan. NPF terbagi menjadi 2 (dua) yaitu NPF Gross dan NPF Net. Dalam penelitian ini, NPF yang digunakan adalah NPF Net. NPF Net adalah jumlah pembiayaan bermasalah telah dikurangi dengan Penyisihan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) dibagi total pembiayaan seperti rumus di bawah:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{JUMLAH PEMBIAYAAN BERMASALAH} - \text{PPAP}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. NPF dinilai dengan kriteria penilaian peringkat yang terdiri dari peringkat 1 (satu) hingga peringkat 5 (lima).⁴⁹

- 1. Peringkat 1 (satu) jika NPF lebih kecil dari 2%.
- 2. Peringkat 2 (dua) jika NPF berkisar antara 2 hingga 5%.
- 3. Peringkat 3 (tiga) jika NPF berada diantara 5 hingga 8%.
- 4. Peringkat 4 (empat) jika NPF berada diantara 8 hingga 12%.
- 5. Peringkat 5 (lima) jika NPF lebih besar dari 12%.

⁴⁹ Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Lampiran 1b .

Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan.⁵⁰

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama, serta menghindari plagiasi terhadap penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan telaah terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa diantaranya dapat dijelaskan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, Sumber	Variabel	Hasil
1	Hendra Fitrianto dan Wisnu Mawardi, 2006, Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, http://ejournal.undip.ac.id	Variabel bebas terdiri dari NPA, NPL, ROA, ROE, LDR, BOPO. Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	ROA berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. LDR berpengaruh negatif terhadap CAR. Sedangkan NPA, NPL, ROE, dan BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR.
2	Siti Fatimah, 2013, Pengaruh Rentabilitas, Efisiensi dan Likuiditas Terhadap Kecukupan Modal Bank	Variabel bebas terdiri dari ROA, BOPO, FDR.	BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. ROA dan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap

⁵⁰ Masyhud Ali, *Asset Liability Management : Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, Jakarta: PT.Gramedia, 2004. h. 46

	Umum Syariah: Study pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk, <i>http://journal.uinjkt.ac.id</i>	Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	CAR. Selain itu, terdapat hubungan jangka panjang antara BOPO dan FDR terhadap CAR, sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan antara ROA, BOPO dan FDR terhadap CAR.
3	Moch Rizal Maolany, Nurhayati dan Helliana, 2015, Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2008-2013, <i>http://karyailmiah.unisba.ac.id</i>	Variabel bebas terdiri dari FDR, ROA. Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	FDR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap CAR.
4	Rizky Natasia, 2015, Pengaruh Risiko Kredit, Profitabilitas, Likuiditas, dan Efisiensi Usaha Terhadap Kecukupan Modal Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014, <i>http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</i>	Variabel bebas terdiri dari NPL, ROA, LDR, BOPO. Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	ROA berpengaruh positif terhadap CAR, NPL berpengaruh negatif terhadap CAR. Sedangkan LDR dan BOPO tidak berpengaruh terhadap CAR.
5	Diah Rochmayanti Suhadi, 2015, Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan Modal Inti Pada Bank Pembangunan	Variabel bebas terdiri dari LDR, IPR, NPL, BOPO, FBIR,	LDR, IPR, NPL memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kecukupan modal inti.

	Daerah, <i>http://eprints.perbanas.ac.id</i>	IRR, PDN. Sedangkan variabel terikatnya adalah rasio kecukupan modal inti.	BOPO dan PDN mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecukupan modal inti. FBIR dan IRR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kecukupan modal inti. LDR, IPR, NPL, BOPO, FBIR, IRR, dan PDN secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecukupan modal inti.
6	Giras Risti Wilara dan Agus Tri Basuki, 2016, Determinan Ketahanan Modal Bank Syariah di Indonesia: Pendekatan ECM, <i>http://journal.umy.ac.id</i> .	Variabel bebas terdiri dari ROA, FDR, BOPO dan Inflasi. Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	ROA dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. FDR berpengaruh negatif terhadap CAR, sedangkan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Selain itu, ada hubungan jangka pendek dan panjang antara ROA, FDR, dan inflasi terhadap CAR.
7	Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, 2016, Analisis Pengaruh Size, ROA, FDR, NPF dan BOPO	Variabel bebas terdiri dari Size, ROA, FDR, NPF, BOPO.	FDR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. Size dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap

	Terhadap Capital Adequacy Ratio pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014, <i>http://ejournal3.undip.ac.id</i>	Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	CAR. BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR.
8	Adi Isa Ansori dan Herizon, 2017, Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (<i>TIER 1</i>) pada bank-bank kelompok buku 3 dan 4, <i>https://journal.perbanas.ac.id</i> .	Variabel bebas terdiri dari LDR, IPR, NPL, APB, BOPO, FBIR, IRR, PDN. Sedangkan variabel terikatnya adalah rasio kecukupan modal inti (<i>TIER 1</i>).	Secara parsial LDR, IPR, dan FBIR berpengaruh positif signifikan terhadap Rasio kecukupan Modal Inti (<i>TIER1</i>). APB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Rasio kecukupan Modal Inti (<i>TIER1</i>). NPL, BOPO dan PDN berpengaruh negatif signifikan terhadap Rasio kecukupan Modal Inti (<i>TIER1</i>). IRR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Rasio kecukupan Modal Inti (<i>TIER1</i>). Sedangkan secara simultan LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (<i>TIER 1</i>).
9	Gladis Kusuma Jaya, 2017, Analisis Pengaruh ROA,	Variabel bebas terdiri dari	Secara parsial ROA dan NPL berpengaruh signifikan

	ROE, NPL, dan LDR Terhadap CAR di Perbankan Indonesia Periode 2004-2015, http://digilib.ubaya.ac.id .	ROA, ROE, NPL dan LDR. Sedangkan Variabel terikatnya adalah CAR.	positif terhadap CAR. ROE dan LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR. Sedangkan Secara Simultan ROA, ROE, NPL dan LDR berpengaruh signifikan terhadap CAR.
--	--	--	---

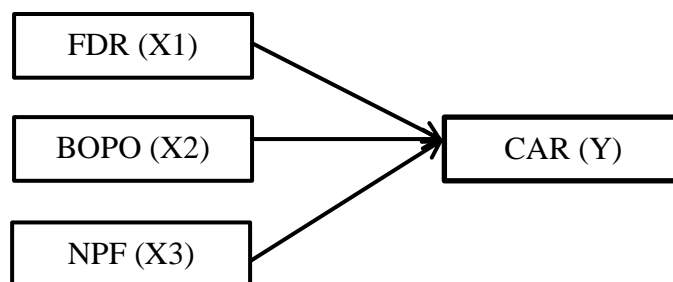
Sumber : Data riset diolah, 2019

2.7 Kerangka Pemikiran

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran dalam, penelitian ini dijelaskan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikembangkan untuk skripsi ini, 2019

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh FDR terhadap CAR

Pada umumnya konsep yang ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *financing to deposit ratio*

(FDR). FDR yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan.

Ketersediaan likuiditas harus cukup, tidak boleh terlalu kecil dan terlalu besar, hal ini agar aktivitas bank tidak terganggu. Jika nilai FDR terlalu tinggi maka perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai FDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan salah satunya melalui pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2013), Giras Risti Wilara dan Agus Tri Basuki (2016) dan Gladis Kusuma Jaya (2017) memperlihatkan hasil FDR berpengaruh negatif terhadap CAR.

Ho : FDR tidak berpengaruh negatif terhadap CAR

Ha : FDR berpengaruh negatif terhadap CAR

2. Pengaruh BOPO terhadap CAR

Pada umumnya konsep yang ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur efisiensi yaitu dengan menggunakan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. BOPO yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 83% yang berarti kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Jika rasio BOPO melebihi 89% maka bank tersebut dapat dikategorikan kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2013) memperlihatkan hasil BOPO berpengaruh positif terhadap CAR.

Ho : BOPO tidak berpengaruh positif terhadap CAR

Ha : BOPO berpengaruh positif terhadap CAR

3. Pengaruh NPF terhadap CAR

Pada umumnya konsep yang ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur pembiayaan yaitu dengan menggunakan *non performing financing* (NPF). NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi NPF maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Bank melakukan penggolongan kualitas pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan *performing* atau pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan yang tidak bermasalah dan *non performing* atau pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan yang bermasalah. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk NPF adalah dibawah 2% dan angka terburuk jika diatas 12%.

Penelitian yang dilakukan oleh Gladis Kusuma Jaya (2017) memperlihatkan hasil NPF berpengaruh positif terhadap CAR.

Ho : NPF tidak berpengaruh positif terhadap CAR

Ha : NPF berpengaruh positif terhadap CAR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai jenis penelitian yang dibuat oleh berbagai kalangan. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian eksplanasi sedangkan berdasarkan tempat pengambilan data maka penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian eksplanasi adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memberi gambaran mengenai hubungan sebab akibat.⁵¹ Sedangkan penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan karena data atau bahan berasal dari perpustakaan.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik.⁵³

3.2 Sumber Data

Penelitian berdasarkan sumber data dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁵⁴

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian dan elemen populasi itu merupakan satuan analisis. Selain itu, populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang

⁵¹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008. h. 38.

⁵² Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Volume 08, 2014. h. 68.

⁵³ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, 2017. h. 1.

⁵⁴ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metode Penelitian Bisnis*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017. h. 111.

ciri-cirinya akan diduga.⁵⁵ Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, atau dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.⁵⁶ Menurut Roscoe dalam Sugiyono ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500.⁵⁷

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam Wardana metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti, dimana ada syarat yang harus dipenuhi agar mendapat sampel yang representatif.⁵⁸ Alasan mengapa metode *purposive sampling* ini dipilih, karena untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah BNI Syariah telah mempublikasikan dengan laporan keuangan triwulan selama periode pengamatan yakni triwulan I 2011 sampai dengan triwulan IV 2018.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh BNI Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada laporan triwulan BNI Syariah pada tahun 2011 sampai 2018 dengan data sejumlah 32 triwulan, dimana data tersebut sudah memenuhi data minimal untuk diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan di *website* resmi PT Bank BNI Syariah (<https://bnisyariah.co.id>). Jenis laporan yang digunakan adalah laporan rasio keuangan triwulan. Data yang diperoleh menggunakan

⁵⁵ Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995. h. 49.

⁵⁶ *Ibid.* h. 51.

⁵⁷ Lusi Angraini, "Populasi dan Sampel". <http://lusi-angraini.blogspot.com/2011/12/populasi-dan-sampel.html>. Diakses pada 27 Mei 2019.

⁵⁸ Syahirul Alim, Jauhar Maqun Asyari. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018. h. 1315.

teknik dokumentasi yang diambil dari triwulan I tahun 2011 sampai dengan triwulan IV tahun 2018.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Penelitian dan pengukuran variabel mendeskripsikan definisi masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rasio kecukupan modal yang diproksikan dengan CAR. Variabel bebas dalam penelitian yaitu FDR, BOPO dan NPF Net. Definisi variabel dan pengukurannya dirangkum pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	Rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.	Pengukuran CAR adalah $\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)	Rasio yang mengukur risiko likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi jangka pendek.	Pengukuran FDR adalah $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
BOPO (Biaya Operasioanal Pendapatan Operasional)	Rasio yang mengukur risiko operasional. Rasio ini menggambarkan efisiensi bank dalam melakukan kegiatannya.	Pengukuran BOPO adalah $\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$

NPF Net (<i>Non Performing Financing Net</i>)	Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. Rasio ini menggambarkan pada penyaluran pembiayaan bank setelah dikurangi Penyisihan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP).	Pengukuran NPF Net adalah $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah} - \text{PPAP}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
--	---	--

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang dilihat dari hasil penelitian. Analisis deskriptif dapat juga diartikan sebagai alat untuk memberikan gambaran tentang suatu data, seperti rata-rata (*mean*), jumlah (*sum*), simpangan baku (*standard deviation*), varians (*variance*), rentang (*range*), nilai minimum dan maksimum, dan sebagainya.⁵⁹

Penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan permasalahan asosiatif (hubungan antar variabel). Analisis data asosiatif bertujuan untuk menganalisis hubungan atau memprediksi pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian regresi linier berganda, sehingga diperlukan uji asumsi klasik. Pengukuran analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan *software SPSS 16.0*.

⁵⁹ Azuar Juliandi. *Mengolah Data Penelitian Bisnis dengan SPSS*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2016. h. 23.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil dalam analisis regresi linear berganda digunakan untuk alat prediksi yang baik atau tidak baik jika digunakan suatu prediksi. Suatu model penelitian yang baik adalah yang telah memenuhi sifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dengan memenuhi beberapa asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya berfungsi normal atau tidak normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan dua uji yaitu uji *Normal P-P Plot Of Regressions Standardized Residual* dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan dari uji *Normal P-P Plot Of Regressions Standardized Residual* adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi uji asumsi normalitas.

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusan dari analisis *One Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai *sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka bisa dikatakan bahwa distribusi data normal. Sebaliknya, jika nilai *sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka bisa dikatakan bahwa distribusi data tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel dependen dan independen. Dalam uji multikolinieritas ini menggunakan dasar keputusan pada nilai *Tolerance* dan nilai VIF.

1. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai VIF lebih kecil dari $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika tidak ditemukan korelasi maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji autokorelasi data dalam penelitian ini menggunakan *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam *run test* adalah jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah autokorelasi.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis untuk mengukur arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : variabel terikat (CAR)

a : konstanta

b : koefisien regresi

X : variabel bebas

X₁ : FDR

X₂ : BOPO

X₃ : NPF

e : *erorterm*

3.6.4 Uji T

Uji t dapat dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya pengaruh secara parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam dasar pengambilan keputusan uji t adalah

1. Jika nilai *sig.* < 0,05 atau kurang dari 5% maka terdapat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai *sig.* > 0,05 atau lebih dari 5% maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

3.6.5 Uji F

Uji f dapat dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya pengaruh secara simultan (bersama) yang diberikan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam dasar pengambilan keputusan uji f adalah

1. Jika nilai *sig.* < 0,05 atau kurang dari 5% maka terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai *sig.* > 0,05 atau lebih dari 5% maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.6.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan (bersama) terhadap variabel terikat. Besaran pengaruh dapat dilihat dengan *R Square*.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang beroperasi sejak 29 April 2000. Pada tahun tersebut UUS BNI memiliki lima kantor cabang yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin,

Dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 telah menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan *spin off* pada 2009 dan selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.

Dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi faktor eksternal dalam pendirian BNI Syariah karena aspek regulasi yang kondusif. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah.

Gambar 4.1

Logo BNI Syariah



Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.1 Profil BNI Syariah

Tabel 4.1
Profil BNI Syariah

Nama Perusahaan	PT Bank BNI Syariah
Bidang Usaha	Usaha perbankan syariah sesuai dengan anggaran dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010
Segmen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis Komersial • Bisnis Konsumer dan Ritel • Bisnis Mikro • Bisnis Tresuri dan Internasional
Tanggal Efektif Operasional	19 Juni 2010
Dasar Hukum Pendirian	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.
Modal Dasar	Rp 4.004.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp 2.501.500.000.000

dan Disetor Penuh	
Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk : 99,94 % • PT BNI Life Insurance : 0,06%
Jumlah Karyawan Tahun 2018	4.942 Pegawai
Jaringan Kantor Tahun 2018	358 Outlet di Seluruh Indonesia
Alamat Kantor Pusat	<p>Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8 Jakarta 12950, Indonesia</p> <p>Telepon : +62 21 2970-1946 Faksimili : +62 21 2966-7947 E-mail : info@bnisyariah.co.id</p>
Website	<p>www.bnisyariah.co.id</p> <p>Berisikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil Perusahaan • Pofil Dewan Pengawas Syariah, Pofil Dewan Komisaris dan Profil Direksi • Produk dan Layanan Perusahaan • Struktur Pemegang Saham • Laporan Keuangan 5 Tahun Terakhir • Informasi Sukuk
Sosial Media	<ul style="list-style-type: none"> • Facebook : PT. Bank BNI Syariah • Twitter : @bnisyariah • Instagram : @bni.syariah

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2018

Dengan mengusung visi “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”, BNI Syariah terus tumbuh agar dapat memberikan pelayanan dan kinerja yang unggul kepada nasabah.

Pertumbuhan BNI sejak menjadi UUS BNI menjadi BUS dapat dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jejak Langkah BNI Syariah

Tahun	Keterangan
2000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin dan menghasilkan laba pertama sebesar Rp 875 juta dengan dukungan 7 (tujuh) kantor cabang.
2002-2004	UUS BNI secara berturut-turut mendapatkan penghargaan <i>The Most Profitable Bank</i> di antara dua Bank Umum Syariah (BUS) dan delapan UUS.
2009	Pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan Mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah.
2010	BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.
2011	BNI Syariah membukukan laba Rp66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta lebih dari 1.000 <i>Syariah Channelling Outlet</i> BNI (SCO BNI) dengan total aset Rp8,4 triliun pada akhir Desember 2011.
2012	Outlet mikro mulai beroperasi dengan penambahan untuk <i>outlet regular</i> sejumlah 10 cabang. Selain itu BNI Syariah berhasil membukukan pencapaian aset

	Rp10 triliun pada 10 November 2012 dan memperoleh 16 penghargaan selama tahun 2012. Satu di antara penghargaan signifikan yang diterima oleh BNI Syariah adalah CASA terbaik 2012 di antara seluruh perbankan syariah.
2013	Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di Gedung Tempo Pavillion 1 sebagai Kantor Pusat yang terpadu.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • BNI Syariah meluncurkan <i>Corporate Campaign</i> “HASANAH Titik” yang bertempat di Gedung Tempo Pavilion 1 Kav.11, Kuningan Jakarta. • Juara 1 pada <i>Annual Report Awards</i> yang diselenggarakan OJK, dengan kategori “<i>Private Keuangan Non Listed</i>”
2015	Penerbitan <i>Sukuk Mudharabah</i> Bank BNI Syariah I Tahun 2015 sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun.
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Meluncurkan Wakaf Hasanah untuk mendukung identitas BNI Syariah menjadi <i>Hasanah Lifestyle Bank</i>. • Juara 1 <i>Sustainable Finance Awards</i> 2016 yang diselenggarakan OJK, dengan kategori BUKU 1 dan 2
2017	BNI Syariah menetapkan <i>Hasanah Banking Partner</i> sebagai <i>strategic positioning</i> BNI Syariah.
2018	BNI Syariah berhasil meraih Penghargaan Internasional

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2018

4.1.2 Produk dan Layanan BNI Syariah

Sepanjang 2018, BNI Syariah memiliki 17 produk simpanan, 12 produk pembiayaan konsumen dan 6 jenis jasa. Secara rinci sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

1) Tabungan BNI iB Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

Keunggulan tabungan ini adalah bebas biaya administrasi bulanan (untuk akad *wadiah*). Bagi nasabah perorangan dilengkapi dengan Hasanah Debit *Silver* yang dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM dan belanja di EDC. Selain itu, tabungan ini juga dilengkapi fasilitas *e-channel* (*Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking*).

2) Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP serta dilengkapi dengan Kartu ATM/Debit *Co-Branding* dengan logo PTN/PTS yang berfungsi sebagai Kartu ATM/Debit dan Kartu Tanda Mahasiswa.

3) Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai / Anggota)

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau akad *wadiah* dari para pegawai / anggota Perusahaan / Lembaga / Asosiasi / Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang dilengkapi dengan Kartu ATM/Debit *Co-Branding* dengan logo institusi yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan Kartu Pegawai/Anggota.

4) Tabungan BNI iB Hasanah (*Classic*)

Tabungan dengan akad *mudharabah* untuk menampung setoran *cash collateral* / *goodwill* nasabah pada setiap penerbitan Hasanah *Card Classic*.

5) Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.

Tabungan ini diperuntukkan untuk nasabah pebisnis yang aktif bertransaksi dan limit transaksi yang lebih besar. Bagi nasabah perorangan dilengkapi dengan Hasanah Debit *Gold* dan fasilitas *e-channel* (*Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*) dengan limit transaksi yang lebih besar.

6) Tabungan BNI iB Prima Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau akad *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

Tabungan ini dilengkapi dengan Kartu ATM/Debit *Zamrud Card* yang memiliki fasilitas *free executive lounge* dan layanan antrian prioritas dan perlindungan asuransi jiwa. Selain itu, tabungan ini juga dilengkapi dengan fasilitas *e-channel* (*Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*).

7) BNI Tabunganku iB Hasanah

Tabungan nasional dengan akad *wadiah* dan setoran awal hanya Rp20.000,-, sehingga menabung menjadi sesuatu habit/kebiasaan di masyarakat. Tabungan ini dilengkapi juga dengan Kartu ATM/Debit dan *e-channel* (*Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*).

8) Tabungan BNI iB Tapenas Hasanah

Tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. Tersedia jangka waktu 1 sampai dengan 18 tahun, dengan setoran bulanan minimal Rp100 ribu dengan bagi hasil lebih tinggi dari tabungan lainnya serta dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa.

9) Tabungan BNI Tapenas Kolektif iB Hasanah

Tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* yang dibuka secara kolektif atas nama masing-masing pegawai dari Institusi dalam mata uang Rupiah dengan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tertentu. Tersedia jangka waktu 6 bulan sampai dengan 35 tahun. Tanggal setoran bulanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

10) Tabungan BNI iB Baitullah Hasanah

Tabungan perencanaan haji maupun umrah berlaku untuk seluruh usia dan dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah*, dengan sistem setoran bebas atau bulanan. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler maupun khusus dengan besar biaya ditentukan oleh Kementerian Agama.

Produk ini dilengkapi dengan kartu Haji dan Umrah Indonesia yang berfungsi sebagai kartu transaksi belanja maupun penarikan tunai di tanah suci, sehingga mengurangi kebutuhan uang tunai yang harus dibawa.

11) Tabungan BNI iB Tunas Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Bebas biaya administrasi bulanan rekening, dilengkapi dengan *Tunas Card* atas nama anak yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan di seluruh EDC di Indonesia.

12) Tabungan Simple BNI iB Hasanah

Tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa sekolah yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Dilengkapi dengan kartu SimPel iB yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan di seluruh EDC di Indonesia.

13) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

14) BNI Giro iB Hasanah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad *mudharabah* maupun akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang Rupiah, USD dan SAR.

15) Deposito BNI iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang Rupiah, USD dan SAR. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

16) BNI Giro Investasi Terikat iB Hasanah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad *mudharabah muqayyadah* untuk menunjang bisnis usaha non perorangan di mana pencairan dana hanya dapat dilakukan pada saat jangka waktu pembiayaan telah berakhir dalam mata uang Rupiah dan USD.

17) BNI Deposito Investasi Terikat iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudharabah muqayyadah* untuk menunjang bisnis usaha non perorangan di mana pencairan dana hanya dapat dilakukan pada saat jangka waktu pembiayaan telah berakhir dalam mata uang Rupiah dan USD.

2. Produk Pembiayaan Konsumen

1) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah

Dengan prinsip *murabahah* (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen da sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah inden, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

2) Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah

Pembiayaan konsumsi yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah antara Nasabah dan Bank yang secara bersama-sama menyerahkan modalnya untuk membeli properti tersebut dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yang selanjutnya nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan Akad Ijarah.

3) Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah

Dengan prinsip *murabahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.

4) Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah

Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.

5) Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad *murabahah*.

6) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa *fix asset* sesuai dengan prinsip syariah.

7) Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/instans yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

8) Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah

Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

9) BNI Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif,

serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

10) BNI Rahn Mikro

Pembiayaan *Rahn* yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya.

11) BNI Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

12) BNI Griya Swakarya iB Hasanah

Adalah proses pembelian aset/objek terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi/ pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli/penyewa (*end-user*) iB *Hasanah Card*. Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

3. Produk Pembiayaan Komersial

1) Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.

2) Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.

3) Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

4) Pembiayaan Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan *mudharabah* di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip syariah kepada *end user*/karyawan.

5) Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

6) Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.

7) Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/ usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan serta dokumen yang berlaku sama kepada seluruh peserta sindikasi dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

8) Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

9) Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah

Pembiayaan produktif yang diberikan kepada *developer* untuk membangun perumahan dan/atau fasilitas umum/sosial serta dilarang digunakan untuk pengadaan dan/atau pengolahan tanah secara langsung/tidak langsung sesuai dengan prinsip syariah.

10) Anjak Piutang iB Hasanah

Jasa pengalihan penyelesaian piutang baik L/C maupun non L/C dari korporat/*Seller* kepada BNI Syariah yang kemudian menagih piutang tersebut kepada *issuing bank* atau pihak yang berutang (mitra korporat/*buyer*). Dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada korporat (nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

11) Penjaminan iB Hasanah

Pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat.

Pada saat mitra korporat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah.

12) Pembiayaan Kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Penyelenggara Ibadah haji khusus (PIHK) atau *Travel Agent* untuk modal kerja.

4. Jasa

1) Jasa Bisnis dan Keuangan

- Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
- RTGS
- Surat Keterangan Bank (SKB)
- Penerimaan Setoran
- Transaksi *Online*
- Modul Pembayaran Negara Generasi Kedua (MPN G2) melalui ATM & Teller.
- Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)

2) Kartu ATM / Debit

- Hasanah Debit Silver
- Hasanah Debit Gold
- Zamrud Card
- Kartu Haji dan Umroh Indonesia
- Kartu Migran Hasanah
- Tunas Card
- Kartu Simpel Ib
- Hasanah Debit GPN

3) Jasa e-Banking

- ATM BNI/BNI Syariah
- *Mobile Banking*
- *Phone Banking*
- *Internet Banking*
- *SMS Banking*
- Hasanah Debit Inline (VCN)

4) Jasa Bisnis Internasional

- *Letter of Credit (L/C)* Impor Suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C Impor.
- *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

5) Layanan Tresuri

- Transaksi *Forex Value Today* maupun *Spot*
- Transaksi *Banknotes*

6) *Bancassurance In Branch*

Aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui Bank, dimana peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai pemberi referensi dan perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari Asuradur Syariah mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada Asuradur Syariah untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Produk yang ditawarkan:

1. *Multiprolink*

Merupakan produk perencanaan keuangan asuransi Unit *Link* yang dikelola dengan prinsip syariah. Memberikan ketenangan dalam merencanakan masa depan keuangan Anda dan Keluarga seperti kebutuhan rencana Pendidikan Anak, Rencana Masa Depan, Rencana Pensiun, Investasi, Haji/Umroh, dll.

2. *Investalink*

Perlindungan Jiwa dan Manfaat Investasi Bebas Memilih Pilihan Investasi Pembayaran Kontribusi Sekaligus Dikelola secara Syariah dan memberikan proteksi

jiwa dan perencanaan keuangan bagi Anda dan keluarga dengan kontribusi sekali bayar, Sakinah Investa Link dapat merencanakan keuangan Anda untuk berbagai kebutuhan yang diidamkan seperti perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan, bahkan perencanaan haji dan umroh.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang dilihat dari hasil penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
CAR	17.5066	2.74754	32
FDR	86.0666	7.04925	32
BOPO	86.2878	4.74281	32
NPF	1.5919	.35757	32

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Selama periode 2011-2018 dengan total sejumlah 32 sampel, CAR memiliki rata-rata 17,50% dengan standar deviasi 2,74%. FDR memiliki rata-rata 86,06% dengan standar deviasi 7,04%. BOPO memiliki rata-rata 86,28% dengan standar deviasi 4,74%. Sedangkan NPF memiliki rata-rata 1,59% dengan standar deviasi 0,35%.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model penelitian yang baik adalah yang telah memenuhi sifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dengan memenuhi beberapa asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi.

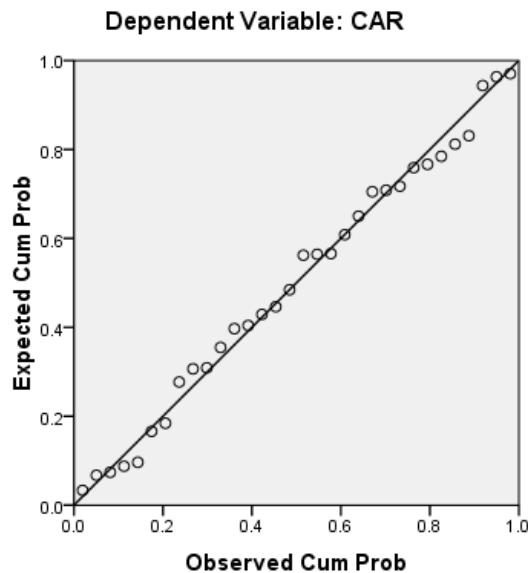
4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel bebas dan terikatnya berfungsi normal atau tidak normal.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Dasar pengambilan keputusan dari uji *Normal P-P Plot Of Regressions Standardized Residual* adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi uji asumsi normalitas. Pada Gambar 4.2 data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data terdistribusi dengan normal. Sehingga penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88585872
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.401
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Dasar pengambilan keputusan dari uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka bisa dikatakan bahwa distribusi data normal. Sebaliknya, jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka bisa dikatakan bahwa distribusi data tidak normal. Pada Tabel 4.4 nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,99 dan lebih dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. Sehingga penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel dependen dan independen.

Tabel 4.5
Hasil Uji *Tolerance* dan VIF

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	41.350	8.502		4.863	.000		
FDR	-.026	.063	-.067	-.415	.681	.645	1.550
BOPO	-.303	.079	-.523	-3.861	.001	.916	1.092
NPF	2.869	1.203	.373	2.385	.024	.686	1.457

a. Dependent Variable: CAR

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Dasar pengambilan keputusan dari uji *tolerance* dan VIF adalah jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas. Pada Tabel 4.5 nilai *tolerance* FDR sebesar 0,64 BOPO sebesar 0,91 NPF sebesar 0,68, nilai *tolerance* ini lebih besar dari 0,10. Sedangkan pada nilai VIF FDR sebesar 1,55 BOPO sebesar 1,09 NPF sebesar 1,45, nilai VIF ini lebih kecil dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi yang kuat, sehingga telah memenuhi uji asumsi multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak ditemukan korelasi maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Pengujian uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Run Test*.

Tabel 4.6
Hasil *Runs Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.11649
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	16
Total Cases	32
Number of Runs	15
Z	-.539
Asymp. Sig. (2-tailed)	.590

a. Median

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Dasar pengambilan keputusan dalam *run test* adalah jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Pada Tabel 4.6 nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,59 dan lebih dari 0,05. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis untuk mengukur arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	41.350	8.502		4.863
	FDR	-.026	.063	-.067	-.415
	BOPO	-.303	.079	-.523	-3.861
	NPF	2.869	1.203	.373	2.385

a. Dependent Variable: CAR

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CAR} = 41.350 - 0.026\text{FDR} - 0.303\text{BOPO} + 2,869\text{NPF} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dari regresi menunjukkan nilai sebesar 41,350 dinyatakan bahwa jika tidak ada variabel FDR, BOPO dan NPF maka CAR adalah sebesar 41,350.
2. Nilai Koefisien regresi FDR terhadap CAR adalah sebesar -0,026. Apabila FDR dinaikkan maka CAR akan menurun sebesar 0,026. Sebaliknya, jika FDR diturunkan maka akan menaikkan CAR sebesar 0,026.
3. Nilai Koefisien regresi BOPO terhadap CAR adalah sebesar -0,303. Apabila BOPO dinaikkan maka CAR akan menurun sebesar 0,303. Sebaliknya, jika BOPO diturunkan maka akan menaikkan CAR sebesar 0,303.
4. Nilai Koefisien regresi NPF terhadap CAR adalah sebesar 2,869. Apabila NPF dinaikkan maka CAR akan naik sebesar 2,869.

Sebaliknya, jika NPF diturunkan maka CAR akan mengalami kenaikan sebesar 2,869.

4.2.4 Uji T

Uji t bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya pengaruh secara parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam dasar pengambilan keputusan uji t adalah jika nilai *sig.* < 0,05 atau kurang dari 5% maka terdapat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dan jika nilai *sig.* > 0,05 atau lebih dari 5% maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.350	8.502		4.863	.000
FDR	-.026	.063	-.067	-.415	.681
BOPO	-.303	.079	-.523	-3.861	.001
NPF	2.869	1.203	.373	2.385	.024

a. Dependent Variable: CAR

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai t FDR menunjukkan arah negatif yakni -0,415 dengan *Sig.* sebesar 0,681 atau 6,81%. Nilai *Sig.* ini lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR pada periode 2011-2018.

2. Nilai *t* BOPO menunjukkan arah negatif yakni -3,861 dengan *Sig.* sebesar 0,001 atau 0,01%. Nilai *Sig.* ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR pada periode 2011-2018.
3. Nilai *t* NPF menunjukkan arah positif yakni 2,385 dengan *Sig.* sebesar 0,024 atau 2,4%. Nilai *Sig.* ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika NPF berpengaruh positif signifikan terhadap CAR pada periode 2011-2018.

4.2.5 Uji F

Uji *f* bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya pengaruh secara simultan (bersama) yang diberikan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam dasar pengambilan keputusan uji *f* adalah jika nilai *sig* < 0,05 atau kurang dari 5% maka terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dan jika nilai *sig* > 0,05 atau lebih dari 5% maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.9

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.768	3	41.256	10.478	.000 ^a
	Residual	110.250	28	3.938		
	Total	234.019	31			

a. Predictors: (Constant), NPF NET, BOPO, FDR

b. Dependent Variable: CAR

Berdasarkan Tabel 4.9, Nilai *Sign. Regression* adalah sebesar 0,000. Nilai *Sign.* ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan jika FDR BOPO dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap CAR.

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas secara simultan (bersama) terhadap variabel terikat. Besaran pengaruh dapat dilihat dengan *R Square*.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.529	.478	1.98432

a. Predictors: (Constant), NPF NET, BOPO, FDR

Berdasarkan Tabel 4.10 R Square menunjukkan 0,529 atau 52,9%. Hal ini membuktikan jika FDR BOPO dan NPF secara simultan dapat menjelaskan sebesar 52,9% terhadap CAR. Sedangkan 47,1% dijelaskan faktor lain selain FDR BOPO dan NPF

4.3 Pembahasan

Hasil Uji Hipotesis dapat diringkas dalam Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Keterangan	Kesimpulan	Hasil
1	Ha	FDR berpengaruh negatif terhadap CAR	Diterima	Nilai t FDR menunjukkan arah negatif
2	Ha	BOPO berpengaruh positif terhadap CAR	Ditolak	Nilai t BOPO menunjukkan arah negatif

3	Ha	NPF berpengaruh positif terhadap CAR	Diterima	Nilai t NPF menunjukkan arah positif
---	----	--------------------------------------	----------	--------------------------------------

4.3.1 Pengaruh FDR Terhadap CAR

Nilai *t* FDR menunjukkan arah negatif dengan *Sig.* sebesar 0,681 atau 6,81%. Nilai *Sig.* ini lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR pada periode 2011-2018. Artinya hipotesis atau dugaan sementara yang menyatakan jika FDR berpengaruh negatif terhadap CAR adalah diterima.

FDR berpengaruh negatif terhadap CAR disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun, sehingga bank perlu menambahkan dananya melalui modal sendiri untuk membiayai jumlah pembiayaan yang diberikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Siti Fatimah (2013), Giras Risti Wilara dan Agus Tri Basuki (2016) dan Gladis Kusuma Jaya (2017) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap CAR.

4.3.2 Pengaruh BOPO Terhadap CAR

Nilai *t* BOPO menunjukkan arah negatif dengan *Sig.* sebesar 0,001 atau 0,01%. Nilai *Sig.* ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR pada periode 2011-2018. Artinya hipotesis atau dugaan sementara yang menyatakan jika BOPO berpengaruh positif terhadap CAR adalah ditolak.

BOPO berpengaruh negatif terhadap CAR disebabkan jika biaya operasional yang harus ditanggung lebih besar daripada jumlah pendapatan operasional yang diterima maka terdapat kemungkinan modal digunakan untuk menutupi biaya operasional yang tidak tertutup oleh pendapatan operasional. Sehingga semakin naik nilai BOPO maka modal yang diperoleh akan turun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian

dari Rizky Natasia (2015), Adi Isa Ansori dan Herizon (2017), Ayusta Riana Dewi dan I Putu Yadnya (2018) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap CAR.

4.3.3 Pengaruh NPF Terhadap CAR

Nilai t NPF menunjukkan arah positif dengan *Sig.* sebesar 0,024 atau 2,4%. Nilai *Sig.* ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika NPF berpengaruh positif signifikan terhadap CAR pada periode 2011-2018. Artinya hipotesis atau dugaan sementara yang menyatakan jika NPF berpengaruh positif terhadap CAR adalah diterima.

NPF berpengaruh positif terhadap CAR karena ekspansi pembiayaan membutuhkan tingkat permodalan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Gladis Kusuma Jaya (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap CAR.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018. Hal ini karena nilai t FDR menunjukkan arah negatif yakni -0,415 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,681 dimana nilai ini lebih dari 0,05.
2. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018. Hal ini karena nilai t BOPO menunjukkan arah negatif yakni -3,861 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,001. dimana nilai ini kurang dari 0,05.
3. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap CAR di BNI Syariah periode 2011-2018. Hal ini karena nilai t NPF menunjukkan arah positif yakni 2,385 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,024. dimana nilai ini kurang dari 0,05.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan mengalami beberapa keterbatasan antara lain, sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas menggunakan variabel FDR (*Financing to Deposit Ratio*), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dan NPF (*Non Performing Financing*) sebagai variabel independen.
2. Penelitian di BNI Syariah ini terbatas pada periode 2011-2018.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan rekomendasi beberapa saran sebagai berikut:

1. Atas dasar hasil analisis yang didapat, maka disarankan bagi pihak manajemen BNI Syariah agar dapat mengelola FDR BOPO dan NPF

karena jika tidak ada variabel FDR, BOPO dan NPF maka nilai konstanta CAR adalah sebesar 41,350.

2. Temuan dalam penelitian ini adalah BOPO lebih mempengaruhi CAR dibanding variabel NPF dan FDR karena tingkat signifikansinya mendekati 0,000. Namun dalam hal ini BOPO dan NPF sama-sama mendekati 0,000 dan tidak melebihi 0,05. Sehingga pengelolaanya dapat dimulai dari BOPO kemudian NPF.
3. Pembiayaan dan Beban Operasional BNI Syariah pada periode penelitian mempengaruhi terhadap tingkat naik turunnya permodalan. Rasio permodalan perlu dijaga atau bahkan dinaikkan agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis ke depan, karena dengan CAR yang tinggi dapat menjadi acuan untuk ekspansi bisnis.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah periode penelitian lebih dari 8 tahun jika menggunakan data triwulan agar hasil dari penelitian dapat menggambarkan perkembangan permodalan bank secara lebih luas dari peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyanti. April, *OJK Keluarkan Peraturan Kesehatan Bank Syariah*. <http://ekonomi/169924/april-ojk-keluarkan-peraturan-kesehatan-bank-syariah>, diakses 6 Maret 2014
- Ali, M. *Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*. Jakarta: PT.Gramedia, 2004.
- Alim, S., & Asyari, J. M. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri*, Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan, 2018.
- Angraini, L. *Populasi dan Sampel*. <http://lusi-angraini.blogspot.com/2011/12/populasi-dan-sampel.html>, diakses 5 Desember 2011.
- Ansori, A. I., & Herizon. *Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Rasio Kecukupan Modal Iinti (TIER 1) pada Bank-bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4. JBB*, 2017.
- Arifin, Z. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Bank Indonesia. PBI Nomor 13/23/Pbi/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- , PBI Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- BNI Syariah. www.bnisyariah.co.id.
- Buchori, A. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Dendawijaya, L. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Djaelani, F. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Ghofur, Abdul. *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*. Semarang: Economica, Volume VII, 2016.
- H, Yoliawan. *Modal BNI Syariah terus menguat di akhir tahun 2017*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/modal-bni-syariah-terus-menguat-di-akhir-tahun-2017>, diakses 14 Maret 2018.

- Hardanto, S. S. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Volume 08, 2014.
- Hasibuan, M. S. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Hermawan, W. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Juliandi, A. *Mengolah Data Penelitian Bisnis dengan SPSS*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2016.
- Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-6, 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Gra-findo Persada, 2012.
- Latumaerissa, J. R. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Machmud, A dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Maulan, R. *Rehad (Renungan Hadits) 120 Larangan Jual Beli Gharar*. <http://rikzamaulan.blogspot.com/2016/08/rehad-120-larangan-jual-beli-gharar.html>, diakses 2 Maret 2019.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- , *Bank Syari'ah Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, R. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Nazaf, F. L. *Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Kecukupan Modal Perbankan*, 2014.
- Nuh, Y. R. *Pengaruh Variabel Makro dan Rasio Keuangan Empiris*, 2016.
- OJK. POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- Prasetyoningrum, A. K. *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Radjab, Enny. Jam'an, Andi. *Metode Penelitian Bisnis*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

- Raharjo, Sahid. <https://spssindonesia.com>.
- Rivai, V. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rivai, V. Veithzal, A. P. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- , *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2008.
- Riyadi, S. *CAR (Capital Adequacy Ratio)*. <https://dosen.perbanas.id/car-capital-adequacy-ratio/>, diakses 10 Maret 2019.
- Rustam, B. R. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Suhardi, G. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sukamto. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Surat Al-Baqarah*, <https://litequran.net/al-baqarah>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Surat Al-Hasyr*, <https://litequran.net/al-hasyr>, diakses pada 18 Juli 2019.
- Surat Luqman*, <https://litequran.net/luqman>, diakses pada 18 Juli 2019.
- Surat Al-Ma'idah*, <https://litequran.net/al-maidah>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Surat An-Nisa'*, <https://litequran.net/an-nisa>, diakses pada 2 Maret 2019.
- Surat Ar-Ra'd*, <https://litequran.net/ar-rad>, diakses pada 12 Juli 2019.
- Suwiknyo, D. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Taswan. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahab. *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah di Semarang*. Economica, 2014.
- Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, 2017.
- Wilara, G. R. Determinan Ketahanan Modal Bank Syariah di Indonesia: Pendekatan ECM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17, 158, 2016.

Wilara, G. R., & Basuki, A. T. Determinan Ketahanan Modal Bank Syariah di Indonesia: Pendekatan ECM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Periode	Bank	CAR	FDR	BOPO	NPF NET
2011 Triwulan 1	BNIS	25.91	76.53	67.98	2.12
2011 Triwulan 2	BNIS	22.24	84.46	78.20	1.71
2011 Triwulan 3	BNIS	20.86	86.13	78.06	1.78
2011 Triwulan 4	BNIS	20.67	78.60	87.86	2.42
2012 Triwulan 1	BNIS	19.07	78.78	91.20	2.77
2012 Triwulan 2	BNIS	17.56	80.94	92.81	1.75
2012 Triwulan 3	BNIS	16.55	85.36	86.46	1.62
2012 Triwulan 4	BNIS	14.10	84.99	85.39	1.42
2013 Triwulan 1	BNIS	14.02	80.11	82.95	0.97
2013 Triwulan 2	BNIS	18.90	92.13	84.44	1.54
2013 Triwulan 3	BNIS	16.63	96.37	84.06	1.49
2013 Triwulan 4	BNIS	16.23	97.86	83.94	1.13
2014 Triwulan 1	BNIS	15.67	96.67	89.41	1.27
2014 Triwulan 2	BNIS	14.53	98.98	90.36	1.36
2014 Triwulan 3	BNIS	19.35	94.32	90.54	1.52
2014 Triwulan 4	BNIS	18.43	92.60	89.80	1.04
2015 Triwulan 1	BNIS	15.40	90.10	89.87	1.30
2015 Triwulan 2	BNIS	15.11	96.65	90.39	1.38
2015 Triwulan 3	BNIS	15.38	89.65	91.60	1.33
2015 Triwulan 4	BNIS	15.48	91.94	89.63	1.46
2016 Triwulan 1	BNIS	15.85	86.26	85.37	1.59
2016 Triwulan 2	BNIS	15.56	86.92	85.88	1.50
2016 Triwulan 3	BNIS	15.82	85.79	86.28	1.41
2016 Triwulan 4	BNIS	14.92	84.57	86.88	1.64
2017 Triwulan 1	BNIS	14.44	82.32	87.29	1.63
2017 Triwulan 2	BNIS	14.33	84.44	86.50	1.76
2017 Triwulan 3	BNIS	14.90	81.40	87.62	1.72
2017 Triwulan 4	BNIS	20.14	80.21	87.62	1.50
2018 Triwulan 1	BNIS	19.42	71.98	86.53	1.67
2018 Triwulan 2	BNIS	19.24	77.42	85.43	1.76
2018 Triwulan 3	BNIS	19.22	80.03	85.49	1.86
2018 Triwulan 4	BNIS	19.31	79.62	85.37	1.52

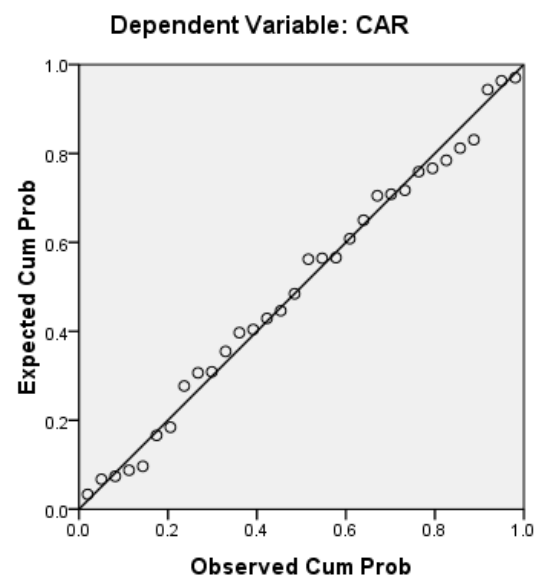
Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
CAR	17.5066	2.74754	32
FDR	86.0666	7.04925	32
BOPO	86.2878	4.74281	32
NPF	1.5919	.35757	32

Lampiran 3 Hasil Uji *Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 4 Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88585872
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.401
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 5 Hasil Uji *Tolerance* dan VIF

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	41.350	8.502		4.863	.000		
	FDR	-.026	.063	-.067	-.415	.681	.645	1.550
	BOPO	-.303	.079	-.523	-3.861	.001	.916	1.092
	NPF	2.869	1.203	.373	2.385	.024	.686	1.457

a. Dependent Variable: CAR

Lampiran 6 Hasil *Runs Test*

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.11649
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	16
Total Cases	32
Number of Runs	15
Z	-.539
Asymp. Sig. (2-tailed)	.590

a. Median

Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.350	8.502		4.863	.000
FDR	-.026	.063	-.067	-.415	.681
BOPO	-.303	.079	-.523	-3.861	.001
NPF	2.869	1.203	.373	2.385	.024

a. Dependent Variable: CAR

Lampiran 8 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.350	8.502		4.863	.000
FDR	-.026	.063	-.067	-.415	.681
BOPO	-.303	.079	-.523	-3.861	.001
NPF	2.869	1.203	.373	2.385	.024

a. Dependent Variable: CAR

Lampiran 9 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	123.768	3	41.256	10.478	.000 ^a
Residual	110.250	28	3.938		
Total	234.019	31			

a. Predictors: (Constant), NPF NET, BOPO, FDR

b. Dependent Variable: CAR

Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.529	.478	1.98432

a. Predictors: (Constant), NPF NET, BOPO, FDR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NUZULUL MUHAMMAD NUR

[+62877 3310 3297] [nuzululmuhammadnur@gmail.com]

[Facebook: Nuzulul Muhammad Nur] [Instagram: @zulul310]

PERSONAL IDENTITY

Birth : Demak, 9th of January 1998
Marital status : Single
Adress : Demak-Tlogosih Street Km.12. Doreng RT 3 RW 1

EDUCATION

- Formal Education

2012-2015 Social Studies, Madrasah Aliyah Negeri Demak
(Senior High School)

Academic Supervisor: Drs. Sobirin, Istiadah, S.Ag,
Mufaid, S.Pd.

2015-present S1 Islamic Banking of Islamic Economics and Business
Faculty, Universitas Islam Negeri Walisongo.
Academic Supervisor: Dr. Muhlis, M.Si.

- Non-formal Education

2015 Access English School at Regular Pogram

2016 Kresna English Language Institute at Toefl Preparation
Program

2016 Access English School at Toefl ITP Program

- Additional Education

November, 2016 Lokakarya Edutainment Nasional: Sukses Menjadi Penulis
Produktif (Indonesia Menulis)

July, 2017 Workshop: Permodalan dan Pengelolaan Keuangan Syariah

UKM Kreatif (Bekraf)

September, 2018 Certification Training: Manajemen Risiko Perbankan Syariah
Tingkat 1 (Asbisindo)

Okt-Nov, 2018 Real Work Lecture at Walisongo State Islamic University in
the village of Mlatiharjo Demak, Central Java

ORGANIZATION EXPERIENCES

2018-present Sahabat Beasiswa Chapter Semarang (Coordinator)

2017-present Generasi Baru Indonesia Semarang (Member)

2015-present Lembaga Pers Mahasiswa Invest (Redactor)

2019-present World Indonesia Scholarship Jawa Tengah (Vice Chairman)